



Research Article

Intesitas Komunikasi Politik Etnis Tionghoa Terhadap Partisipasi Poltik Aktif di DKI Jakarta

Ilman Heriyawan¹, Muhammad Aksal²; Kevin Gustilanti Marrel³

1. Universitas Mercubuana Yogyakarta, Indonesia; ilmanheriyawan@gmail.com 
2. Universitas Mercubuana Yogyakarta, Indonesia; aksalh.tasri@gmail.com
3. Universitas Mercubuana Yogyakarta, Indonesia; vinkevin574@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 31, 2024

Revised : September 24, 2024

Accepted : October 18, 2024

Available online : November 08, 2024

How to Cite : Ilman Heriyawan, Muhammad Aksal, & Kevin Gustilanti Marrel. (2024). The Intensity of Ethnic Chinese Political Communication on Active Political Participation in DKI Jakarta. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 3(3), 294–312. <https://doi.org/10.58355/historical.v3i3.102>

The Intensity of Ethnic Chinese Political Communication on Active Political Participation in DKI Jakarta

Abstract. Exploring the complexity of the political landscape in Jakarta influenced by ethnic diversity, with a focus on the significant role of the Chinese ethnic group in political dynamics. Starting from the foundation of ethnic diversity, the aim is to investigate the intensity of political communication within the Chinese ethnic group and its impact on public perception and political participation in Jakarta. Understanding the dynamics of political communication becomes increasingly crucial, especially in the context of the potential for the government and politicians to leverage these opportunities through appropriate approaches, creating a multicultural political contestation. This approach requires an understanding of various aspects, including intercultural communication, communication psychology, and the media's impact on policies. This research specifically explores public perception of political

communication within the Chinese ethnic group, uncovering how political messages are understood by Jakarta's diverse society across different social and ethnic layers. The analysis encompasses levels of political participation, including participation in general elections and contributions to political organizations. To address the complexity, this research analyzes factors influencing political communication within the Chinese ethnic group, including social, cultural, economic, and political aspects, to understand the context shaping their political messages. Despite facing challenges in obtaining credible data, this research is expected to provide practical insights for the Chinese ethnic group, the government, and the general public in designing inclusive communication strategies and strengthening social harmony in Jakarta.

Keywords: Ethnic Diversity in Jakarta, Political Communication of the Chinese Ethnic Group, Public Perception in Jakarta, Multicultural Political Participation, Intercultural Political Communication.

Abstrak. Mengeksplorasi kompleksitas lanskap politik di Jakarta yang dipengaruhi oleh keragaman etnis, dengan fokus pada peran signifikan Etnis Tionghoa dalam dinamika politik. Dengan titik awal pada keragaman etnis sebagai landasan penting, ini bertujuan untuk menyelidiki intensitas komunikasi politik Etnis Tionghoa dan dampaknya terhadap persepsi publik serta partisipasi politik di Jakarta. Pentingnya memahami dinamika komunikasi politik menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks potensial pemerintah dan politikus untuk memanfaatkan peluang ini melalui pendekatan yang tepat, menciptakan kontestasi politik yang bersifat multikultural. Pendekatan ini memerlukan pemahaman dalam berbagai aspek, komunikasi antar budaya, psikologi komunikasi, dan dampak media terhadap kebijakan. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi persepsi publik terhadap komunikasi politik Etnis Tionghoa, menggali cara pesan politik dipahami oleh masyarakat Jakarta dari berbagai lapisan sosial dan etnis. Analisis mencakup tingkat partisipasi politik, termasuk kehadiran dalam pemilihan umum dan kontribusi dalam organisasi politik. Dalam mengatasi kompleksitas, penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi politik Etnis Tionghoa, termasuk aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, untuk memahami konteks yang membentuk pesan politik mereka. Meskipun dihadapkan pada kendala dalam mencari data yang kredibel, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi Etnis Tionghoa, pemerintah, dan masyarakat umum dalam merancang strategi komunikasi yang inklusif dan memperkuat harmoni sosial di Jakarta.

Kata Kunci: Keragaman Etnis di Jakarta, Komunikasi Politik Etnis Tionghoa, Persepsi Publik Jakarta, Partisipasi Politik Multikultural, Komunikasi Politik Antar Budaya

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnis yang kaya, menampilkan kompleksitas sosial dan politik yang unik. Dalam konteks ini, etnis Tionghoa muncul sebagai kelompok dengan kontribusi signifikan dalam sejarah, budaya, dan ekonomi. Fokus isu ini terletak pada Jakarta, ibu kota dan pusat aktivitas politik dan ekonomi, di mana komunitas etnis Tionghoa memiliki keberadaan yang kuat dan berpengaruh, terutama dalam sektor ekonomi.

Di Jakarta, yang merupakan panggung dinamika politik yang sangat kompleks, terdapat fenomena menarik terkait dengan komunikasi politik etnis Tionghoa. Meskipun menjadi bagian integral dari masyarakat lokal, terdapat keterbatasan dalam intensitas komunikasi politik mereka. Hal ini menciptakan realitas sosial yang perlu dipahami lebih mendalam, terutama mengingat peran vital etnis Tionghoa dalam kehidupan ekonomi Jakarta.

Dalam konteks politik DKI Jakarta, keterlibatan etnis Tionghoa memiliki relevansi yang besar. Data populasi menunjukkan bahwa mereka menduduki posisi signifikan dalam struktur demografis, membuktikan daya tarik Kota Jakarta sebagai tempat tinggal dan berbisnis bagi etnis Tionghoa.

Sebagai salah satu ibukota dan merupakan Provinsi terpadat di Indonesia Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki total populasi hingga (10.679.951) juta jiwa menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) Pemprov DKI Jakarta tahun 2020-2022 (SP2020 & tahun/Juni, 2020), pada sensus tersebut terdapat data yang menyatakan bahwa saat ini terdapat 5,5% (587.397) dari (10.679.951) Persentase tersebut membuktikan bahwa warga Tionghoa DKI adalah yang terbesar ketiga setelah Provinsi Bangka-Belitung (11,54%) dan Kalimantan Barat (9,46%), sehingga dapat kita interpretasikan DKI Jakarta memiliki daya tarik sendiri bagi etnis Tionghoa di Indonesia (Administrator, Indonesia.go.id, Portal Informasi Indonesia)

Gambar 1 (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta)

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)			
	2020	2021	2022
	27 749	28 240	28 925
	2 226 812	2 233 855	2 244 623
	3 037 139	3 056 300	3 083 883
	1 056 896	1 066 460	1 079 995
	2 434 511	2 440 073	2 448 975
	1 778 981	1 784 753	1 793 550
	10 562 088	10 609 681	10 679 951

il SP2020; 2021-2022: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 /Juni)

Showing 1 to 7 of 7 entries

Meskipun memiliki pengaruh ekonomi yang besar, partisipasi politik mereka cenderung terbatas. Relevansinya terletak pada pemahaman mendalam terhadap interaksi kompleks antara komunikasi politik, persepsi publik, dan partisipasi politik dalam konteks multikultural Jakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan yang kaya tentang dinamika politik dan sosial di ibu kota Indonesia. Dengan memperhatikan fenomena ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga untuk pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, mempromosikan integrasi sosial, dan menciptakan lingkungan politik yang inklusif di Jakarta.

Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat merespon positif terhadap diversitas etnis dan membangun fondasi yang kuat untuk kemajuan politik dan sosial di masa depan, dengan memperhatikan fenomena tersebut, sehingga Etnis Tionghoa dapat memberikan kontribusi berharga untuk pengembangan strategi komunikasi politik yang lebih efektif, mempromosikan integrasi sosial, dan menciptakan lingkungan politik yang inklusif di Jakarta.

Penelitian sebelumnya telah mencoba mengungkap kompleksitas fenomena politik yang melibatkan Etnis Tionghoa di Jakarta. Sejumlah literatur telah menjelaskan kontribusi signifikan etnis ini dalam sejarah, budaya, dan ekonomi Indonesia. Jakarta, sebagai panggung politik yang dinamis, menjadi sorotan khusus dalam memahami keberadaan dan peran etnis Tionghoa. Salah satu aspek yang telah ditekankan oleh penelitian sebelumnya adalah adanya keterbatasan dalam intensitas komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta¹.

Beberapa penulis telah mencatat bahwa, meskipun menjadi elemen integral dalam kehidupan ekonomi kota, partisipasi politik mereka terasa terbatas. Keberagaman budaya dan agama di Jakarta, yang seharusnya menjadi kekayaan, ternyata juga menciptakan ketidakpahaman dan hambatan dalam komunikasi politik mereka.

Kelemahan utama yang dicatat oleh para peneliti sebelumnya adalah adanya faktor-faktor yang membatasi komunikasi politik etnis Tionghoa. Beberapa di antaranya termasuk kebijakan pemerintah, prasangka sosial, dan kurangnya pemahaman tentang warisan budaya mereka. Sejarah konflik etnis dan politik identitas di Jakarta juga telah membentuk dinamika sosial yang menjadi kendala dalam menciptakan komunikasi politik yang efektif.

Penelitian sebelumnya juga menyoroiti kontroversi politik yang melibatkan etnis Tionghoa, khususnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Kasus tersebut, yang menampilkan Ahok sebagai kandidat etnis Tionghoa², menunjukkan bahwa politik identitas etnis dan agama dapat memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Demonstrasi massa 411 dan 212 yang terkait dengan kasus tersebut turut memberikan dampak besar pada persepsi publik dan partisipasi politik³.

Pada tahun 2016, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih dikenal sebagai Ahok, adalah Gubernur DKI Jakarta. Kasus yang menarik perhatian publik adalah tuduhan penistaan agama yang dialamatkan kepadanya. Kontroversi dimulai ketika Ahok mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam pidatonya yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai penistaan agama Islam.

Pada 31 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa pernyataan Ahok telah menista agama Islam. Sehari setelahnya, pada 1 November 2016, Ahok resmi menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya. Proses hukum terus berlanjut, dan pada 9 Mei 2017, Ahok dihukum dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara⁴.

¹ (1) Moh Sugiharto, 2018)

² (Arsenius Wisnu, 2023)

³ (Adam, 2022)

⁴ (Indah Mutiara Kami, 2016)

Kasus ini menimbulkan kontroversi besar di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Banyak yang melihatnya sebagai ujian terhadap toleransi agama di Indonesia dan mengkritik keputusan pengadilan sebagai tindakan yang merugikan hak asasi manusia. Beberapa orang mendukung keputusan pengadilan, sementara yang lain menyangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Ahok, hal ini memicu semakin munculnya proyeksi dari politik identitas di Jakarta

Memicu demonstrasi besar-besaran umat islam di Jakarta, Kasus demontasi Ahok, atau Basuki Tjahaja Purnama, mantan Gubernur DKI Jakarta, merupakan suatu peristiwa yang mencuat dalam ranah politik Indonesia. Ahok, seorang politisi yang kontroversial, menjadi sasaran tindakan demonstrasi yang mengharuskan mundurnya dari jabatannya pada tahun 2017. Kasus ini mencerminkan kompleksitas komunikasi politik di Indonesia, terutama dalam hal keterlibatan unsur agama dalam politik. Komunikasi politik yang terjadi sepanjang kasus ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, partai politik, dan media massa⁵.

Pada tingkat masyarakat, terjadi polarisasi pendapat yang mendalam terkait kasus Ahok. Komunikasi politik di kalangan masyarakat tercermin dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi, di mana kelompok pendukung dan penentang Ahok saling berhadapan. Penggunaan media sosial juga menjadi alat penting dalam mengamplifikasi pesan dan pandangan politik masing-masing pihak. Selain itu, partai politik juga turut serta dalam menyuarakan posisi mereka terkait kasus ini, menciptakan dinamika politik yang kompleks.⁶

Adanya unsur agama dalam kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Para pemimpin politik perlu memahami sensitivitas agama dalam berkomunikasi dan membangun dialog yang inklusif untuk mencegah polarisasi yang berlebihan. Kasus demontasi Ahok mencerminkan tantangan dalam membangun komunikasi politik yang sehat dan berkelanjutan di tengah keragaman budaya dan agama di Indonesia.

Di Jakarta sendiri terdapat Kawasan *Chinatown* yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan wisata hanya saja daerah tersebut rawan akan konflik hal ini terjadi berdasarkan pengalaman sejarah orde baru 1998 dimana daerah tersebut menjadi pusat konflik karena ada faktornya provokator yang berdampak pula ketakutan partisipasi politik Etnis Tioghoa karena adanya faktor sejarah kendala tersebut nampaknya meruncing pada kurangnya upaya dalam meningkatkan komunikasi politik yang ideal di antara etnis Tionghoa di Jakarta.⁷

Populasi etnis Tionghoa yang signifikan di Jakarta, mencapai 5,5% dari total penduduk, menandakan daya tarik yang kuat bagi komunitas tersebut. Artikel-artikel sebelumnya menyoroti sejumlah kendala dalam komunikasi politik etnis Tionghoa. Stereotip, prasangka, dan faktor sejarah, termasuk masa lalu konflik etnis, terus membatasi interaksi dan partisipasi politik mereka. Kebijakan pemerintah,

⁵ (Wiradetia Abiyoso1, 2019)

⁶ (Mayasari, 2017)

⁷ (Fitrya, 2013)

prasangka sosial, dan kurangnya pemahaman tentang warisan budaya juga menjadi penghambat dalam mencapai komunikasi politik yang efektif.

Beberapa kekurangan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu cenderung minim dalam menyajikan data empiris atau hasil penelitian spesifik yang dapat mendukung klaim-klaim tersebut. Penjelasan yang lebih mendalam tentang contoh konkret atau analisis rinci tentang cara komunikasi politik etnis Tionghoa terjadi di Jakarta. Selain itu, kurangnya penyebutan ahli atau pandangan eksternal juga menjadi kelemahan dalam pemahaman fenomena ini. Dengan memasukkan pandangan dan penelitian dari sumber-sumber yang berbeda, analisis dapat menjadi lebih berimbang dan mendalam.

Sebagai tanggapan terhadap kekurangan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya mengenai fenomena politik Etnis Tionghoa di Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi beberapa aspek utama yang masih memerlukan pemahaman lebih mendalam. Ada tiga tujuan khusus yang menjadi fokus utama dalam upaya mengisi kekosongan pengetahuan dan merespons kekurangan tersebut.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut kendala politik identitas yang dialami oleh etnis Tionghoa di Jakarta. Dalam konteks ini, kami akan menyelidiki lebih jauh dampak sejarah konflik etnis dan bagaimana politik identitas dapat memengaruhi partisipasi politik mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi konstruktif untuk mengatasi kendala politik identitas.

Kedua, penelitian ini berupaya mengidentifikasi potensi peningkatan dalam komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta. Dengan menganalisis kebijakan pemerintah, stereotip sosial, dan pemahaman yang kurang tentang warisan budaya mereka, kami akan mencari cara efektif untuk memperkuat intensitas komunikasi politik. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat etnis Tionghoa dapat lebih aktif dan efektif berpartisipasi dalam dialog politik di Jakarta (Winda Kustiawan, 2022).

Tujuan ketiga adalah mendorong inklusivitas politik di Jakarta. Dengan mengeksplorasi kasus kontroversial Pilkada DKI Jakarta 2017 dan peristiwa massa 411 dan 212, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara meningkatkan pemahaman lintas-etnis dan meminimalkan dampak politik identitas dalam pemilihan umum. Dengan demikian, penelitian ini berharap dapat merancang strategi untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok etnis di Jakarta⁸.

Dalam menjawab tantangan politik dan sosial yang dihadapi oleh etnis Tionghoa di Jakarta, penelitian ini membawa fokus pada respon konstruktif terhadap kekurangan yang telah diidentifikasi. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap kendala politik identitas, upaya meningkatkan komunikasi politik, dan dorongan untuk inklusivitas politik, penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat bagi perkembangan politik dan sosial di Jakarta. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan

⁸ (Putra, 2018)

mempromosikan partisipasi politik yang merata di kalangan berbagai kelompok Chinatown etnis di Jakarta⁹.

Pembahasan sebelumnya mencakup kehadiran tiga yang terkenal di Jakarta, yaitu *Glodok*, *Pantai Indah Kapuk (PIK)*, dan *Old Shanghai Sedayu City*. Populasi etnis Tionghoa yang signifikan di Jakarta, mencapai 5,5% dari total penduduk, menandakan daya tarik yang kuat bagi komunitas tersebut. Seiring perkembangan zaman, etnis Tionghoa telah menjadi integral dalam perkembangan budaya dan ekonomi kota (Mita Amalia Hapsari)

Meskipun demikian, artikel-artikel sebelumnya menyoroti sejumlah kendala dalam komunikasi politik etnis Tionghoa. Stereotip, prasangka, dan faktor sejarah, termasuk masa lalu konflik etnis, terus membatasi interaksi dan partisipasi politik mereka. Kebijakan pemerintah, prasangka sosial, dan kurangnya pemahaman tentang warisan budaya juga menjadi penghambat dalam mencapai komunikasi politik yang efektif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Metode kuantitatif deskriptif merupakan metode dengan memberikan gambaran atau rancangan melalui variabel-variabel dari apa yang akan diteliti. Menurut (Sugiyono 2017) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang memiliki dasar atas filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan.

Untuk menginvestigasi Pengaruh Intensitas Komunikasi Politik Etnis Tionghoa terhadap Politik di Jakarta. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara numerik, memungkinkan analisis statistik yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih terperinci tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Paradigma Penelitian menurut (Sugiyono, 2016) paradigma pada penelitian dimaknai sebagai sebuah pola pemikiran yang bisa menunjukkan serta membuktikan adanya hubungan antar variabel yang nantinya diteliti serta juga memperlihatkan jenis serta hasil dari rumusan masalah yang dibutuhkan untuk diberi hasilnya dari penelitian serta teori yang dipakai agar bisa mendapatkan hipotesis, jenis, serta jumlah dari hipotesis, dan teknik dari analisis yang akan dipakai untuk bisa menjawab rumusan masalah tersebut.

Dalam penelitian ini, paradigma penelitian yang digunakan adalah pendekatan sederhana dengan menggunakan dua variabel utama, yaitu Variabel X (Intensitas Komunikasi Politik Etnis Tionghoa) dan Variabel Y (Partisipasi Politik Aktif di Jakarta). Paradigma ini mengambil pendekatan yang langsung dan jelas, fokus pada hubungan antara komunikasi politik Etnis Tionghoa dengan partisipasi politik masyarakat Jakarta.

⁹ (Winda Kustiawan, Karakteristik dalam Komunikasi Politik Mengemas Pesan Politik, 2022)

Kami percaya bahwa realitas kompleks masyarakat dapat dipahami melalui pendekatan yang sederhana namun mendalam. Variabel X mencakup berbagai aspek intensitas komunikasi politik Etnis Tionghoa, termasuk pesan politik, metode komunikasi, dan interaksi dengan masyarakat. Variabel Y, di sisi lain, mencakup pemahaman dan pandangan masyarakat Jakarta terhadap komunikasi politik ini serta tingkat partisipasi politik mereka yang dapat tercermin dalam pemilihan umum, aksi politik, atau keanggotaan dalam organisasi politik. Dengan fokus pada variabel ini, paradigma penelitian sederhana ini memungkinkan kami untuk mendalami kompleksitas hubungan antara komunikasi politik Etnis Tionghoa dan partisipasi politik di lingkungan multikultural Jakarta.

Penelitian ini menggunakan Teori Harold Lasswell (Riswandi, 2009) dalam dengan tiga indikator penilitian yaitu, Komunikator Politik (*Source/who*), Pesan Politik (*Says what/message*), Sasaran atau Media Politik (*with what effect*), Sasaran atau Target Poltik (*To Whom/receiver*) untuk menganalisa Intesitas Komunikasi Poltik Etnis Tionghoa dan Teori Milbrath dan Goel yaitu, Apatis, Spektator, Gladiator, dan Pengkritik untuk menganalisa variabel Partisipasi Politik Aktif di Jakarta.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian mengenai Intensitas Komunikasi Politik Etnis Tionghoa dan Partisipasi Politik di Jakarta, pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner yang dirancang dengan teliti. Kusioner ini dirancang dengan berpedoman pada indikator-indikator variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Setiap pertanyaan dalam angket diarahkan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terkait fenomena politik etnis Tionghoa di Jakarta. Pada kuesioner ini, pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert. Skala ini memungkinkan responden untuk memilih satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah disesuaikan, yaitu mulai dari.

Skala Likert memberikan gradasi jawaban yang mencakup spektrum dari sangat positif hingga sangat negatif. Dengan menggunakan skala ini, variabel penelitian yang mencakup Intensitas Komunikasi Politik Etnis Tionghoa dan Partisipasi Politik dapat diukur dengan cermat,. Dalam penelitian ini, kami juga menggunakan data sekunder penulis mengakses data yang dibutuhkan dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan materi penelitian ini

PEMBAHASAN

Komunikasi Politik

Komunikasi politik menjadi alat vital dalam terciptanya kontestasi politik yang bebas dan terbuka tanpa adanya pengaruh politik identitas di dalamnya, kemajemukan etnis di Jakarta justru menjadi awal mulanya Etnis Tionghoa memiliki ruang lingkup yang sempit dalam konteks politik. Menurut Dr. Rusadi Katrapawira komunikasi politik dapat diartikan sebagai penghubung dari pikiran politik yang hidup dalam masyarakat baik golongan, intra, asosiasi, institusi maupun sektor kehidupan dalam politik pemerintahan. Rusadi juga berpendapat bahwa komunikasi politik ialah suatu pendekatan dalam pembanungunan politik. Melalui komunikasi politik maka tokoh-tokoh yang terlibat dalam meletakan basis guna

menganalisis permasalahan yang muncul serta berkembang secara keseluruhan proses untuk perubahan politik dari suatu bangsa (Katrapawira, 2009)

Faktor-faktor yang membatasi komunikasi politik etnis Tionghoa di Jakarta melibatkan kebijakan pemerintah, prasangka sosial, serta kurangnya pemahaman tentang warisan budaya mereka. Masa lalu konflik etnis dan keberagaman budaya dan agama di Jakarta menjadi penghambat dalam menciptakan komunikasi politik yang efektif.

Membangun komunikasi politik yang baik di antara etnis Tionghoa, atau kelompok etnis mana pun, bertujuan untuk mempromosikan pemahaman, dialog, dan kerjasama yang konstruktif. Terdapat beberapa tujuan khusus dalam membangun komunikasi politik yang baik di antara etnis Tionghoa atau kelompok etnis lainnya, dengan harapan dapat mengurangi kontestasi politik yang bersifat negatif dan terbatas, menciptakan strategi komunikasi politik yang baik dapat memberikan

Dalam kontestasi politik di Jakarta dan dinamika sosial-politik yang terus berkembang, peran komunikasi politik menjadi semakin krusial. Dalam konteks ini, satu konsep yang menjadi pusat perhatian adalah "Intensitas Komunikasi Politik Etnis Tionghoa." Etnis Tionghoa, sebagai kelompok minoritas di Indonesia, memiliki potensi untuk partisipasi ke dalam ranah politik di Jakarta. Frekuensi Komunikasi Politik: Melibatkan seberapa sering anggota etnis Tionghoa berkomunikasi politik, baik secara langsung maupun melalui media massa dan sosial. Ini mencakup partisipasi dalam diskusi politik, pertemuan, dan aktivitas komunikasi politik lainnya¹⁰.

1. Jenis Komunikasi Politik: Mengacu pada berbagai bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, termasuk penggunaan media sosial, pidato publik, wawancara media, dan kegiatan komunikasi politik lainnya.
2. Isi Komunikasi Politik: Membahas konten atau pesan politik yang disampaikan oleh etnis Tionghoa. Ini mencakup pendapat mereka tentang kebijakan politik, nilai-nilai politik yang diusung, serta pandangan mereka terhadap isu-isu politik tertentu.
3. Partisipasi dalam Kelompok Politik Etnis Tionghoa: Menilai sejauh mana anggota etnis Tionghoa terlibat dalam kelompok politik mereka sendiri. Hal ini dapat mencakup keanggotaan dalam organisasi atau partai politik etnis Tionghoa serta partisipasi dalam kegiatan politik internal mereka.

Politik Identitas

Kasus kontroversial Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, yang melibatkan Ahok, seorang politisi etnis Tionghoa, menjadi puncak perdebatan politik identitas. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa politik identitas etnis dan agama dapat memengaruhi hasil pemilihan secara signifikan. Etnis dapat memberikan faktor sumbangan yang banyak khususnya dalam konsteks politik, hal ini menjadi bukti

¹⁰ (Hasfi, 2019)

kuat Politik Identitas masih menjadi permasalahan di kontetasi politik di Jakarta. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan.¹¹

Biopolitik mendasarkan diri pada pebedaan-perbedan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994. Pertemuan tersebut menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktik politik identitas dan menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik.¹²

Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (grand narrative), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (freedom), toleransi dan kebebasan bermain (free play), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (race thinking), biofeminisme, dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru intoleransi, praktik-praktik (Heller, 1983).

Identitas politik etnis Tionghoa di Jakarta mengacu pada cara individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka dalam konteks politik di ibu kota Indonesia. Ini melibatkan hubungan dengan sejarah, budaya, dan kontribusi etnis Tionghoa dalam lingkungan politik Jakarta.

1. Pengakuan Sejarah Lokal: Sejauh mana etnis Tionghoa di Jakarta mengenali dan memahami peran sejarah mereka dalam membentuk politik lokal, termasuk periode kolonial dan dinamika budaya setempat.
2. Interaksi Budaya: Keterlibatan dalam aktivitas budaya lokal, seperti festival atau acara komunitas, yang dapat membentuk identitas politik etnis Tionghoa di Jakarta.
3. Peran Ekonomi: Bagaimana kontribusi ekonomi etnis Tionghoa di Jakarta tercermin dalam identitas politik mereka, terutama dalam konteks bisnis dan pengembangan ekonomi lokal.
4. Keseimbangan Identitas Ganda: Bagaimana individu etnis Tionghoa di Jakarta menjaga keseimbangan antara identitas etnis mereka dan identitas sebagai warga Jakarta yang multikultural.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memengaruhi atau memperoleh pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik masyarakat memiliki hubungan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam upaya menciptakan iklim demokrasi di Indonesia.

Seorang pakar sosiologi politik Almond dan Verba (1963) yang dipengaruhi oleh aliran struktur fungsional sosiologi sejak abad XIX dan awal abad XX telah berusaha melakukan berbagai kajian dalam konteks perubahan sosial dan dampak

¹¹ (Kurniawan, 2018)

¹² (Tverdova, 2001)

perubahan pemikiran masyarakat terhadap perubahan politik yang semakin meningkat. Pemikiran Almond dan Verba dalam bukunya "*the civic culture*" mengungkap bagaimana kelompok masyarakat dan masyarakat pada umumnya untuk hidup berdampingan dalam situasi demokrasi yang stabil¹³.

Partisipasi aktif politik etnis Tionghoa di Jakarta mencakup segala bentuk keterlibatan dalam proses politik di tingkat lokal, dari pemilihan umum hingga kegiatan advokasi untuk meningkatkan representasi dan pengaruh mereka.

1. Pemilihan Umum Lokal: Tingkat partisipasi dalam pemilihan umum di tingkat lokal, termasuk dukungan terhadap kandidat etnis Tionghoa dan keikutsertaan dalam kampanye pemilihan umum.
2. Keterlibatan dalam Organisasi Politik: Terlibat dalam organisasi politik yang mewakili kepentingan etnis Tionghoa di tingkat lokal, seperti partai politik atau kelompok advokasi kultural.
3. Media dan Keterlibatan Sosial: Menggunakan media sosial dan platform lainnya untuk menyampaikan pesan politik, memobilisasi dukungan, dan berpartisipasi dalam diskusi politik lokal.
4. Partisipasi dalam Inisiatif Kebijakan: Aktivitas aktif dalam mendukung dan menginisiasi kebijakan lokal yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan etnis Tionghoa di Jakarta¹⁴.

Semua ini semakin mempertegas adanya korelasi komunikasi politik, identitas politik, dan partisipasi menunjukkan adanya hubungan yang kompleks dalam membentuk dinamika politik suatu masyarakat. Komunikasi politik yang baik dapat memengaruhi identitas politik individu dan kelompok, serta pada gilirannya memotivasi atau menghambat partisipasi dalam kehidupan politik. Para ahli internasional, seperti Benedict Anderson, menyoroti peran konstruksi identitas dalam membentuk kesadaran politik suatu komunitas.

Dalam konteks etnis Tionghoa di Indonesia, sejarah dan dinamika komunikasi politik memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik dan partisipasi mereka. Pada masa lalu, adanya stereotip dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dapat menjadi penghambat partisipasi politik mereka. Namun, dengan perubahan sikap masyarakat, reformasi politik, dan komunikasi politik yang lebih inklusif, identitas politik etnis Tionghoa semakin terbuka dan partisipasi mereka dalam kehidupan politik meningkat.

Para ahli internasional, seperti Samuel Huntington, juga menyoroti peran identitas politik dalam membentuk konflik atau kerjasama di antara kelompok etnis. Komunikasi politik yang membangun dan mempromosikan kesamaan nilai dapat mengurangi ketegangan identitas politik dan memperkuat partisipasi bersama¹⁵.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa komunikasi politik yang memperhatikan identitas politik dapat membentuk iklim yang mendukung

¹³ Beckwith, K. (1986). *American women and political participation: the impacts of work, generation, and feminism*. Britania Raya: Bloomsbury Academic. (Beckwith, 1982)

¹⁴ (Yohanes De Britto Bimo Triwicaksono, 2021)

¹⁵ White, M. J. (2003). *Political Philosophy: An Historical Introduction*. Finlandia: Oneworld. (White, 2010)

partisipasi yang lebih aktif dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk etnis Tionghoa di Indonesia. Peningkatan partisipasi politik etnis Tionghoa juga mencerminkan evolusi komunikasi politik yang lebih inklusif dan mendukung keberagaman dalam masyarakat.

HASIL

Kajian dan analisis setiap aspek dari masalah satu per satu. Hal ini diperlukan untuk membangun argumen dan menganalisis data yang dibahas dan dibandingkan dengan penelitian dan karya sarjana lain. Dengan kata lain, cara untuk membahas suatu masalah di sini adalah dengan menggabungkan data dan pembahasan. Jika perlu menyertakan tabel, gambar, figur, atau ilustrasi lainnya.

Populasi yang di gunakan merupakan warga negara Indonesia (WNI), dan warga atau masyarakat DKI Jakarta berusia 18 tahun keatas dan memiliki hak pilih dalam Pemilu maupun Pilkada¹⁶ yang sesuai mengenai pengaruh intensitas komunikasi politik etnis Tionghoa terhadap partisipasi politik aktif di Jakarta, sampel yang diambil harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan fokus, topik, dan rumusan masalah penelitian yang dilakukan, agar sampel dikatakan representatif atau mewakili populasi. Dalam menentukan sampel kali ini saya menggunakan rumus slovin sebagai salah satu acuan data statisiknya, Rumus Slovin untuk menentukan sampel dari jumlah populasi yang besar adalah:

$$n = \frac{N}{Ne^2 + 1}$$

di mana:

- nn = ukuran sampel yang diinginkan
- NN = jumlah populasi
- ee = tingkat kesalahan yang diizinkan (biasanya berkisar antara 0,01 hingga 0,05, tergantung pada presisi yang diinginkan), tetapi di kali ini saya menggunakan 10% Batas kesalahan pengambilan sampel sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam rumus ini, peneliti menghitung ukuran sampel (nn) dengan membagi jumlah populasi (NN) dengan faktor koreksi, yaitu $1+N(e2)1+N(e2)$. Rumus Slovin membantu peneliti dalam menentukan ukuran sampel yang representatif dari populasi besar dengan memperhitungkan tingkat kesalahan yang diizinkan (ee) jadi, dengan jumlah populasi 587.397 dan tingkat kesalahan yang diizinkan sebesar 10%, ukuran sampel yang dibutuhkan menggunakan rumus Slovin adalah sekitar 100 orang (Prof. Ir. Edi Abdurachman MS, 2022)¹⁷. (Slovin 1960). Total Pertanyaan kuisoner sebanyak 22 pertanyaan dengan 10 Variabel (X) dan 12 Variabel (Y)

Uji Validitas dan Reabilitas

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan kuisoner sebagai media, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memahami peran setiap variabel dalam proses penelitian. Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana

¹⁶ (Admin, Website: www.kpu.go.id, 2024)

¹⁷ (Prof. Ir. Edi Abdurachman MS M. P., 20 September 2022, p. Hal 77) di akses pada E-book 10.45, 29 Oktober 2023

setiap instrumen kuisioner dalam penelitian ini dapat dianggap valid atau tidak (Sugiyono, 2017) Uji validitas berfungsi untuk mengevaluasi keakuratan data yang diperoleh dari jawaban kuesioner objek penelitian dan apakah data tersebut dapat mengukur indikator yang diinginkan. Jika data tersebut dianggap valid, indikator tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur variabel Intesitas Komunikasi Poltik Etnis Tionghoa dan variabel Partisipasi Politik Aktif di Jakarta

Uji validitas dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen yang menjadi pernyataan dalam kuisioner dapat dianggap valid. Hasil uji validitas dari penelitian ini dianalisis menggunakan Program SPSS versi 23 dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel

Tabel 1.2 Validitas Variabel Intensitas Komunikasi Politik

Variabel (x)	r Hitung
P1	0.555
P2	0.534
P3	0.688
P4	0.565
P5	0.741
P6	0.800
P7	0.728
P8	0.423
P9	0.579
P10	0.565

Dari tabel diatas, instrumen Intensitas Komunikasi Politik (X) dengan tingkat signifikan 5% dari degree of freedom (df) = n-2 diperoleh hasil (r) tabel sebesar 0,196. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 mahasiswa, maka derajat kebebasannya adalah $n - 2 = 100 - 2 = 98$. Hasil nilai (r) hitung yang didapatkan > dari nilai (r) tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel (X) adalah valid.

Tabel 2 Validitas Variabel Partisipasi Politik

Variabel (y)	r Hitung
P11	0.341
P12	0.476
P13	0.315
P14	0.465
P15	0.462
P16	0.451

P17	0.443
P18	0.438
P19	0.226
P20	0.442
P21	0.415
P22	0.330

Dari tabel diatas, instrumen Partisipasi Politik (Y) dengan tingkat signifikan 5% dari degree of freedom (df) = n-2 diperoleh hasil (r) tabel sebesar 0,196. Hasil nilai (r) hitung yang didapatkan > dari nilai (r) tabel, maka dapat disimpulkan bahwa instrument pada variabel (Y) adalah valid.

Data dari kuesioner juga telah dianalisis reliabilitasnya untuk menentukan apakah instrumen pengukuran tersebut dapat diandalkan atau memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ketika digunakan berulang kali pada objek penelitian yang sama, tetap menghasilkan data yang konsisten atau stabil. Secara sederhana, reliabilitas mencerminkan kestabilan atau konsistensi suatu instrumen pengukuran dalam mengukur indikator gejala yang sama. Selain itu, uji reliabilitas juga dilakukan untuk memastikan bahwa responden memberikan jawaban yang konsisten dalam survei kuesioner. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan metode Cronbach's Alpha (α) dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk mengukur hubungan antar indikator. Jika nilai Alpha yang diperoleh lebih dari 0,70, maka instrumen pengukuran dianggap dapat diandalkan. Berikut adalah hasil uji reliabilitas dari data kuesioner.

Tabel 2.1 Hasil Uji Realibilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha
Intensitas Komunikasi Politik (x)	0.761
Partisipasi Politik (y)	0.761

Dari hasil uji reliabilitas yang telah dipaparkan, sesuai dengan tabel diatas yang menunjukkan bahwa hasil dari Cronbach's Alpha pada variabel (x) pengaruh Intensitas Komunikasi Politik sebesar 0,761 sedangkan, varibel (y) Partisipasi Politik sebesar 0,761. Maka, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas tersebut dinyatakan reliabel karena kedua variabel menghasilkan nilai Cronbach's Alpha > 0,700.

Uji Prasyarat Regresi

Setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen variabel Intensitas Komunikasi Politik (X) dan Partisipasi Politik (Y) maka dilanjutkan dengan analisis linear dan normalitas sebagai prasyarat melakukan uji regresi untuk mengetahui persamaan dan hubungan antar masing-masing variabel. Uji normalitas kolmogrov Smirnov pada software aplikasi SPSS menunjukkan hasil uji dengan nilai $asympt.sig (2-tailed) 0,071 > 0,050$ karena nilai uji lebih besar dari 0,05 maka kedua data variable yang digunakan dapat dipastikan berdistribusi normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji linear yang menunjukkan hasil nilai $sig 0,113 > 0,050$. Maka, dapat disimpulkan bahwa antara variabel Intensitas Komunikasi Politik (x) dan variabel Partisipasi Politik (y) di Jakarta memiliki hubungan yang linier.

Variabel	Standardized Coefficient	Sig
Intensitas Komunikasi Politik (x)	0.420	0.000
R Square	0.176	

Uji Regresi Linear Sederhana

Setelah melakukan uji prasyarat dengan hasil yang menunjukkan nilai $>0,050$ maka dapat dilakukan analisis regresi linear sederhana yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Intensitas Komunikasi Politik (x) terhadap Partisipasi Politik (y). Adapun hasil Analisa regresi disajikan pada Tabel 4.

Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variable (x) Intensitas Komunikasi Politik menunjukkan nilai $sig.(2-tailed) 0,000 < 0,050$ dengan koefisien beta sebesar 0.176. artinya variabel Intensitas Komunikasi Politik berpengaruh terhadap Partisipasi Politik (y) di Jakarta (H_1 diterima). Koefisien R kuadrat pada hasil uji regresi linear adalah 0.176 sehingga dapat disimpulkan bahwa Intensitas Komunikasi Politik (X) memengaruhi Partisipasi Politik (Y) sebesar 17,6% sedangkan sisanya yaitu sebesar 82,4% Partisipasi Politik dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Temuan lainnya yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0.420 memberikan gambaran bahwa setiap satu satuan peningkatan pada Intensitas Komunikasi Politik berhubungan dengan peningkatan sebesar 0.420 satuan dalam Partisipasi Politik masyarakat di Jakarta. Selanjutnya, nilai signifikansi (Sig) yang sangat kecil sebesar 0.000 menunjukkan bahwa hasil ini tidak terjadi secara kebetulan dan dapat dikatakan bahwa walau pengaruh yang diberikan sedikit, namun terdapat hubungan

yang cukup signifikan terkait pengaruh Intensitas komunikasi politik etnis tionghoa terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Jakarta.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa intensitas komunikasi politik etnis Tionghoa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat Jakarta. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel intensitas komunikasi politik (X) berkontribusi sebesar 17,6% terhadap partisipasi politik (Y) di Jakarta. Meskipun pengaruhnya relatif kecil, namun signifikan secara statistik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi politik yang intens dari etnis Tionghoa dapat menjadi salah satu faktor yang memotivasi peningkatan partisipasi politik di tengah masyarakat multikultural Jakarta. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa komunikasi politik yang memperhatikan identitas politik dapat membentuk iklim yang mendukung partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat.

Pentingnya peran komunikasi politik dalam membuka ruang partisipasi politik etnis Tionghoa di Jakarta juga mencerminkan evolusi komunikasi politik yang lebih inklusif dan mendukung keberagaman dalam masyarakat. Dengan adanya perubahan sikap masyarakat, reformasi politik, dan komunikasi politik yang lebih terbuka, identitas politik etnis Tionghoa semakin terbuka, dan partisipasi mereka dalam kehidupan politik meningkat.

Simpulan dari penelitian ini memberikan pemahaman bahwa faktor komunikasi politik memegang peran penting dalam membentuk identitas politik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan kelompok etnis Tionghoa, dapat lebih memperhatikan dan memahami peran komunikasi politik dalam mendorong partisipasi politik yang lebih aktif. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan relevansi teori-teori seperti teori identitas politik dan teori konflik atau kerjasama antar kelompok etnis dalam konteks komunikasi politik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang kompleksitas hubungan antara komunikasi politik, identitas politik, dan partisipasi politik dalam konteks etnis Tionghoa di Indonesia. Implikasi dari temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi politik yang lebih aktif dari berbagai kelompok masyarakat, menciptakan dinamika politik yang lebih sehat dan demokratis.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa peran komunikasi politik tidak hanya sebatas alat untuk menyampaikan pesan politik, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan politik. Perubahan dalam intensitas komunikasi politik etnis Tionghoa mencerminkan adanya adaptasi terhadap dinamika politik dan pergeseran sikap masyarakat terhadap kelompok etnis tertentu.

Dengan melibatkan teori-teori seperti teori Harold Lasswell dan teori Milbrath dan Goel, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami mekanisme komunikasi politik dan dampaknya terhadap partisipasi

politik. Teori-teori ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dan menjadi pedoman dalam merancang strategi komunikasi politik yang efektif.

Selain itu penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan berperan dalam kelancaran penelitian ini. Terima kasih kepada responden yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Tanpa partisipasi mereka, penelitian ini tidak mungkin berhasil. Penghargaan juga untuk semua pihak yang telah memberikan waktu dan perhatian dalam mengisi kuesioner, memberikan data, dan berbagi informasi yang berharga.

Penelitian ini pula memiliki beberapa kelemahan yang perlu diakui. Pertama, keterbatasan sampel dapat memengaruhi generalisasi temuan, meskipun upaya telah dilakukan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Kedua, keterbatasan waktu dan anggaran membatasi kedalaman analisis dan pengumpulan data, yang mungkin mengakibatkan aspek-aspek tertentu tidak tercakup secara menyeluruh. Ketiga, subjektivitas responden dapat memunculkan bias dalam hasil, karena jawaban dapat dipengaruhi oleh faktor interpretasi personal. Keempat, terdapat variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini, sehingga temuan mungkin tidak mencakup seluruh faktor yang relevan

DAFTAR PUSTAKA

- SP2020, 2. H., & tahun/Juni), 2.-2. P.-2. (2020). *Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta*. Retrieved from <https://jakarta.bps.go.id:https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html>
- Administrator, Indonesia.go.id, Portal Informasi Indonesia. (2020, Januari Kamis). *Gebyar Imlek di Situs Pecinan Batavia*. Retrieved Januari 2024, from [indonesia.go.id:https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1624/gebyar-imlek-di-situs-pecinan-batavia](https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/1624/gebyar-imlek-di-situs-pecinan-batavia)
- Arsenius Wisnu, A. P. (2023, Juni 3). Konflik Sosial dan Politik Identitas sebagai Kecacatan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017. *DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI*, 7(1), 1-20.
- cscscsb. (bbc). bbb. *dbdb*, *ffnfnfnf*.
- Adam, Y. F. (2022, July). Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia. *Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 6(20), 1-20.
- Indah Mutiara Kami, D. N. (2016, September Selasa). *MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya* Baca *artikel detiknews*, "MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-t>. Retrieved Januari 2024, from [www.detik.com:https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya](https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya)

- Mayasari, S. (2017, September). Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing P. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 1-11.
- Fittrya, L. (2013, Mei). TIONGHOA DALAM DISKRIMINASI ORDE BARU TAHUN 1967-2000. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(2), 1-8.
- Mita Amalia Hapsari, K. N. (2021, Juni 4). 5 Lokasi Chinatown di Jabodetabek Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Lokasi Chinatown di Jabodetabek", *Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/00300081/5-lokasi-chinatown-di-jabodetabek?page=all>*. Kompascom+ b. Retrieved January 2024, from [www.kompas.com: https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/00300081/5-lokasi-chinatown-di-jabodetabek?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/00300081/5-lokasi-chinatown-di-jabodetabek?page=all)
- Katraprawira, D. R. (2009).
- Mita Amalia Hapsari, K. N. (2022, September 8). 5 Lokasi Chinatown di Jabodetabek Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Lokasi Chinatown di Jabodetabek", *Klik untuk baca: <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/00300081/5-lokasi-chinatown-di-jabodetabek?page=all>*. Kompascom+ b. Retrieved Januari 2024, from [www.kompas.com: https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/00300081/5-lokasi-chinatown-di-jabodetabek?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/09/08/00300081/5-lokasi-chinatown-di-jabodetabek?page=all)
- Katrapawira, D. R. (2009).
- Kurniawan, Y. W. (2018). Konstruksi Citra Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Dalam Pilkada Dki Jakarta 2017 Putaran I Melalui Pemberitaan Di Kompas.Com Dan Republika.Co.Id Pada Periode September 2016 - Februari 2. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnin*, 4(1), 1-20.
- Tverdova, C. J. (2001, October). Winners, Losers, and Attitudes about Government in Contemporary Democracies. *International Political Science Review*, 22(4), 1-23.
- Heller, A. (1983). *A Theory of History*. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.
- Beckwith, K. (1982). *American women and political participation: the impacts of work, generation, and feminism*. Britania Raya: Bloomsbury Academic.
- White, M. J. (2010). *An Historical Intoduction*. Michigan, Arizona, USA: One World.
- Prof. Ir. Edi Abdurachman MS. (2022).
- 1 Moh Sugiharto, 2. D. (2018, November). DINAMIKA POLITIK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPANYE PUTARAN KEDUA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2017. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), 1-20.
- Wiradetia Abiyoso1, S. T. (2019). Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dalam Aksi Bela Islam Pada Tahun 2016 di Jakarta. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, 3(2), 78-100.

- Winda Kustiawan, A. F. (2022). Karakteristik dalam Komunikasi Politik Mengemas Pesan Politik. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 2017-2014.
- Winda Kustiawan, A. F. (2022). Karakteristik dalam Komunikasi Politik Mengemas Pesan Politik. *Jurna Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen. (JIKEM)*, 2(1), 2017-2014.
- Putra, F. M. (2018, September). RADIKALISASI ISU AGAMA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 78-90.
- Hasfi, N. (2019, April). KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93-111.
- Yohanes De Britto Bimo Triwicaksono, A. N. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah Article Sidebar. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 133-145.
- Admin, Website: www.kpu.go.id. (2024). *Bagaimana Cara Menjadi Pemilih Pemilu 2024?* Retrieved from www.kpu.go.id: <https://www.kpu.go.id/page/read/1133/cara-menjadi-pemilih#:~:text=Answer%3A%20Pemilih%20adalah%20Warga%20Negara,ka win%20Catau%20sudah%20pernah%20kawin.>
- Melakukan wawancara via online dengan pengurus pusat konferedensi KASBI (Divisi Hukum dan Advokasi; Wahyu Wicaksono